
FAKTOR PENGHAMBAT PERDAMAIAN KONFLIK PALESTINA–ISRAEL

Aos Yuli Firdaus¹, Yanyan Mochamad Yani²

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Nasional

²Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran, Bandung
email : aosyulifirdaus@civitas.unas.ac.id, yan2m@hotmail.com

Korespondensi : aosyulifirdaus@civitas.unas.ac.id

Abstract

Palestinian-Israeli peace that is expected by the people of both parties and expected by the international community is still constrained by several factors, especially internal barriers from the two conflicting parties. Israel is faced with an internal friction between the two parties, where the first group who wants the existence of Israel as a strong state as the raison d'etre of Israel's existence itself. Or the second option means taking the path of peace that leads to the establishment of an independent Palestinian State. While on the Palestinian side the obstacles to achieving Palestinian independence were hampered by internal factors, namely the conflict between Fatah and Hamas which became a stumbling block to Palestinian power in achieving ultimate independence from Israel.

Keywords: *peace, conflict, israel, palestine, obstacle factor*

Abstrak

Perdamaian Palestina- Israel yang diharapkan oleh rakyat ke dua belah pihak dan diharapkan oleh masyarakat dunia internasional masih terkendala beberapa faktor terutama hambatan internal dari ke dua pihak yang berkonflik. Israel dihadapkan pada friksi internal antara dua pihak, dimana kelompok pertama yang menginginkan eksistensi Israel sebagai negara kuat sebagai *raison d'etre* eksistensi Israel itu sendiri. Atau pilihan kedua berarti menempuh jalan perdamaian yang mengarah kepada pembentukan Negara Palestina merdeka. Sementara di pihak Palestina hambatan untuk mencapai kemerdekaan Palestina terhambat oleh faktor internal yaitu adanya konflik antara Fatah dan Hamas yang menjadi batu sandungan kekuatan Palestina dalam mencapai kemerdekaan hakiki dari Israel.

Kata kunci : perdamaian, konflik, israel, palestina, faktor penghambat

PENDAHULUAN

Konflik Israel-Palestina merupakan salah satu masalah sentral dan krusial di kawasan Timur Tengah. Konflik dan resolusi konflik pun menjadi salah satu isu yang tetap saja menonjol dalam perkembangan studi politik di dunia hampir sepanjang abad 20 bahkan sampai abad 21 saat ini, terutama masalah pertikaian Arab – Israel. Sejarah mencatat awal mula konflik terbuka perang Arab – Israel dimulai sejak tahun 1948. Dimana negara-negara Arab yang bersatu melawan Israel

pada perang tahun 1948 yaitu; Mesir, Suriah, Libanon, Irak, Jordan, Saudi Arabia, Yaman dan milisi Palestina.

Apabila Manifesto Bilu diluncurkan oleh kelompok pencinta zion (*Dovevei zion*) pada tahun 1882 dijadikan sebagai patokan bagi timbulnya gerakan zionisme modern, maka masalah Arab-Israel telah berumur lebih dari satu abad. Oleh karena itu dalam upaya untuk menciptakan perdamaian yang menyeluruh di dunia internasional, kawasan Timur Tengah, khususnya konflik Palestina dan Israel tetap menjadi fokus yang utama.

Israel memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 14 Mei 1948, sehari sebelum Inggris menyerahkan mandatnya atas Palestina kepada PBB pada 15 Mei 1948. Dengan kemerdekaan tersebut, harapan orang-orang Yahudi yang tersebar di berbagai bagian dunia untuk mendirikan negara sendiri di tanah Palestina, tercapai. Mereka telah melaksanakan “amanat” yang disampaikan Theodor Herzl (pendiri Zionisme Politik) dalam bukunya *Der Judenstaat* (Negara Yahudi) sejak tahun 1896.

Berdirinya negara Israel (*Medinat Yisrael*) merupakan hasil perjuangan panjang kelompok Zionisme politik yang sebenarnya bertentangan dengan cita-cita Zionisme keagamaan. Dengan berdirinya Israel, menurut Garaudy (1995), Zionisme tidak kembali menjadi gerakan keagamaan, bahkan mereka semakin sewenang-wenang terhadap orang yang bukan Yahudi. Israel melakukan kebijakan dalam negeri secara diskriminatif dan rasis. Garaudy menyamakan Zionis Israel dengan politik *apartheid* Afrika Selatan.

Permasalahan friksi internal yang dihadapi Palestina dan Israel menunjukkan masalah perdamaian perlu dijelaskan dari beberapa faktor yang menghambat upaya perdamaian tersebut, pertanyaannya apa faktor penghambat perdamaian Palestina dan Israel?

Dinamisasi Konflik

Eksistensi Negara Israel sampai sekarang masih menjadi bahan *dispute* kontroversial. Tetapi lepas dari beda konteks penilaian, di dalam negara Israel sendiri senantiasa mengalami dilema yang tiada habis-habisnya. Dilema itu tidak hanya terkait dalam satu aspek semata, tidak hanya ideologi, tetapi juga politik termasuk kemudian turut memberi corak terhadap perumusan kebijakan politiknya terhadap Palestina.

Ditinjau dari segi ideologi, inti dan akar dilema Israel sesungguhnya terletak pada salah satu dari dua realitas yang sangat sulit, yaitu meninggalkan identitas Negara Israel yang secara ideologi bertumpu pada Zionisme karena adanya realitas-realitas internal baru baik di kalangan warga Yahudi dan Israel sendiri maupun di lingkungan bangsa Palestina, atau memenuhi tuntutan bagi pengakuan kemerdekaan Palestina.

Dihadapkan pada salah satu pilihan yang kedua-duanya ibarat buah si malakama, masyarakat Yahudi dan Negara Israel menghadapi krisis sosial, keagamaan dan politik yang luar biasa sulit. Memakan buah si malakama yang pertama berarti meninggalkan *raison d’etre* eksistensi Israel itu sendiri. Sementara mengambil buah si malakama kedua berarti menempuh jalan perdamaian yang

mengarah kepada pembentukan Negara Palestina merdeka, seperti yang dilakukan oleh mendiang Perdana Menteri Yitzhak Rabin melalui Kesepakatan Oslo maupun kerangka perdamaian yang berusaha ditempuh Perdana Menteri Ehud Barak dalam formula KTT (KTT Camp David II).

Dalam masyarakat Yahudi baik yang tinggal di Israel maupun di luar Israel (diaspora) berkembang kecemasan yang kian meninggi ketika menyaksikan semakin lebarnya jurang di antara cita-cita ideologi Zionisme dengan realitas yang mereka hadapi dalam konfrontasi dengan bangsa Palestina. Persepsi diri bangsa Yahudi dan Negara Israel seakan tercabik-cabik, bukan hanya karena perkembangan yang mereka hadapi, khususnya sejak bangkitnya gerakan *Intifadhah*, Desember 1987 (Perez, 1990) yang terus berlanjut meskipun kadang-kadang *on and off*, tetapi juga karena perubahan-perubahan sosial, politik dan keagamaan dalam masyarakat Yahudi sendiri baik yang berdiam di Israel maupun yang berada di diaspora (perantauan, pengembaraan, pengasingan) khususnya di Amerika Serikat dan Eropa (Jacob, 1997)

Dalam kajian yang lebih khusus, (Jourgensmeyer, 2000) dan (Armstrong, 2000) menunjukkan adanya peningkatan radikalisisasi dan fundamentalisasi terjadi tidak hanya di kalangan para “pejuang” Palestina, tetapi juga di kalangan orang-orang Israel. Kecenderungan ini pada gilirannya juga tidak bisa dilepaskan dari meningkatnya gejala “kebangkitan agama” yang bersifat global, yang melanda hampir seluruh agama mulai dari Kristen, Yahudi, Islam, Hindhu dan lain-lain. Semangat fundamentalisasi dan radikalisisasi dapat dilihat pada bertumbuh cepatnya di kalangan bangsa Yahudi apa yang disebut sebagai Zionisme Baru (*New Zionism*), yang mempersoalkan masalah “identitas”. Persoalan mengenai identitas ini sengaja memang tidak dibahas ketika Israel diproklamasikan pada tahun 1948, karena memang sangat kontroversial.

Fragmentasi ideologis tersebut kemudian berkembang dan berdampak terhadap kehidupan politik Israel. Masalah politik dalam negeri Israel pada akhirnya akan sangat mempengaruhi terhadap perumusan kebijakan politik Israel atas Palestina. Secara politik terdapat dua kelompok besar dalam masyarakat Israel, terkait dengan cara mereka memandang masalah Palestina.

Kubu pertama adalah kubu pragmatis Israel, yang memandang perdamaian Palestina-Israel sebagai strategi untuk mewujudkan kepentingan (jangka pendek, antara dan jangka panjang) dan keamanan Israel. Sehingga dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut Israel harus bersedia membayar harga politik yang semestinya. Menurut kubu ini konflik Palestina-Israel memiliki sentuhan akhlak, kemanusiaan, dan hak dalam konteks hubungan antara penjajah dan rakyat yang dijajah yang harus diperhatikan. Kelompok ini yang dalam kancah politik kepartaian Israel tergabung dalam Partai Buruh Israel (*Mifleget Ha'avoda Ha-Israelit*).

Kubu kedua, adalah kubu idealis Israel, yang memandang kekuatan Israel adalah jaminan keamanan dan kepentingannya. Menurut kubu ini, perdamaian membawa manfaat, tetapi harga politiknya harus ditekan sedikit mungkin, apalagi Israel memiliki keunggulan militer yang jauh lebih modern atas semua negara Arab. Kelompok ini kemudian terhimpun dalam Partai Likud.

Tetapi kendati terdapat perbedaan dalam hal cara pandang penyelesaian konflik, antara mereka masih memiliki titik temu dalam prinsip yang dinamakan garis merah Israel, yaitu bahwa Israel tidak akan kembali ke perbatasan tahun 1967, tidak ada kedaulatan penuh Palestina atas kompleks Masjid Al Aqsha, dan tidak ada hak kembali bagi pengungsi Palestina.

Selain faktor internal Israel yang cenderung menghambat upaya perdamaian, ada beberapa faktor penyebab konflik Palestina-Israel yaitu; Menguatnya posisi Israel karena selalu didukung oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa, munculnya tokoh-tokoh ekstrim di Israel yang semakin agresif dan konfrontatif. Di pihak lain, posisi Palestina menjadi semakin lemah akibat semakin lemahnya persatuan bangsa-bangsa Arab, serta adanya konflik internal di tubuh Palestina sendiri.

Upaya Penyelesaian Masalah

Untuk menegakan keadilan dan upaya penyelesaian masalah di Timur Tengah dilakukan melalui berbagai cara; Militer (perang 1948, 1956, 1967 dan 1973) dan upaya diplomasi baik bilateral maupun multilateral. Diplomasi bilateral antara Mesir – Israel tahun 1977 dalam pengembalian Sinai.

Sedangkan upaya diplomasi multilateral dilakukan antara Amerika Serikat, Mesir dan Israel tahun 1978 dalam perjanjian Camp David. Tahun 1993 menghasilkan perundingan Oslo I dan 1994 Oslo II. Kemudian berlanjut tahun 2002 antara Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia dan PBB (*the Quartet*) menghasilkan Peta Jalan Damai (*Road Map*) yang intinya mengupayakan negara Palestina yang merdeka pada tahun 2005, penghentian kekerasan dari kedua belah pihak.

Upaya Stabilisasi Politik & Keamanan Kawasan Timur Tengah (Israel-Palestina) Melalui Berbagai Forum Regional dan Multilateral diantaranya yaitu;

1. KTT Liga Arab di Alger, Aljazair, 22-23 Maret 2005.
2. KTT Pertama negara Amerika Selatan dan negara Arab di Brasilia-DF, Brasil, 10-11 Mei 2005.
3. KTT Liga Arab di Khartoum, Sudan, 28-29 Maret 2006

Pada KTT Liga Arab 22-23 Maret 2005, menghasilkan suatu rekomendasi untuk mengaktualisasikan kembali Proposal Damai Arab. Diupayakan juga membentuk Troika yang beranggotakan Aljazair, Tunisia dan Sudan untuk menyosialisasikan proposal damai Arab kepada dunia internasional.

Adapun beberapa kesepakatan lain yang dihasilkan dalam bentuk Proposal Damai yang Mengemuka dalam KTT Liga Arab di Alger yaitu;

- a. Proposal Damai Arab
- b. Isi Proposal Damai Arab meminta agar Israel mundur dari seluruh tanah Arab yang diduduki dalam perang 1967, mendukung berdirinya negara Palestina merdeka dengan ibukota Yerusalem Timur, dan juga solusi adil bagi pengungsi Palestina dengan imbalan normalisasi hubungan dunia Arab secara kolektif dengan Israel.
- c. Proposal Damai Yordania
- d. Proposal Damai Yordania menghasilkan rekomendasi agar ada normalisasi hubungan dunia Arab dengan Israel sebelum adanya penyelesaian konflik

Arab-Israel. Namun proposal ini ditolak dalam Pertemuan Tingkat Menteri Liga Arab.

- e. Proposal Damai Libya
- f. Proposal dimaksud pernah disampaikan pada KTT Liga Arab di Beirut tahun 2002 dimana isi proposal tersebut ialah mengusulkan solusi negara demokrasi untuk Israel dan Palestina di tanah Palestina dengan nama "Isratin". Namun proposal ini tidak mendapat sambutan pada KTT Liga Arab Alger

Selain Proposal Damai yang direkomendasikan dalam KTT Liga Arab, juga ada usulan dan upaya perdamaian dalam bentuk pembuatan kesepakatan melalui Peta Jalan Perdamaian (PJP) yang merupakan inisiatif dari kelompok Quartet (AS-Rusia-PBB-Uni Eropa)

PJP mempunyai sasaran utama yaitu; penyelesaian akhir dan menyeluruh bagi konflik Palestina – Israel, kesepakatan yang berisikan dibentuknya satu negara Palestina merdeka, demokratis dan langgeng, hidup berdampingan secara damai dan aman dengan Israel, diakhirinya pendudukan yang dimulai tahun 1967, serta kepemimpinan yang kuat rakyat Palestina untuk bertindak secara tegas melawan terorisme

Upaya penyelesaian konflik yang terakhir sebelum pecah perang di Gaza ialah perundingan Annapolis. Dimana Pertemuan Annapolis itu menghasilkan kesepakatan antara Perdana Menteri Isrel Ehud Olmert dan Presiden Palestina Mahmud Abbas bahwa Israel dan Palestina akan meningkatkan perundingan dengan sasaran dapat mencapai penyelesaian sengketa Israel-Palestina pada akhir 2008.

Adapun upaya penyelesaian konflik melalui jalur PBB diantaranya digagas dalam bentuk pembuatan resolusi PBB yang bersifat kasuistik.

- a. Resolusi MU PBB No. 181 Tahun 1947
- b. Resolusi MU PBB No. 194 Tahun 1948 tentang izin kembali para pengungsi Palestina
- c. Resolusi DK PBB No. 237 Tahun 1967
- b. Resolusi DK PBB No. 242 Tahun 1967 tentang penarikan pasukan zionis Israel dari tanah jajahan Palestina yang dijajahnya pada perang 1967
- c. Resolusi DK PBB No. 338 Tahun 1973
- d. Resolusi DK PBB No. 376 Tahun 1975
- e. Resolusi DK PBB No. 1397 Tahun 2002 tentang berdirinya negara Palestina

Hambatan Resolusi

Semua upaya menghidupkan kembali upaya perdamaian di Timur Tengah, terutama Palestina, sangat tergantung pada kesungguhan Israel untuk menyelesaikannya, karena Israel-lah yang menjadi akar permasalahan sengketa tak berkesudahan tersebut dan penentu arah perdamaian.

Banyak analisa yang menyatakan bahwa ada dua garis realistik ketika berbicara konflik maupun penyelesaian damai masalah Palestina, yang pertama adalah faktor AS dan kedua adalah faktor Israel (Sudarsono, 1996). Setiap perjuangan bersenjata maupun perundingan senantiasa gagal karena kedua faktor tersebut.

Amerika Serikat dianggap oleh banyak pengamat timur tengah sebagai penghamabat Resolusi konflik Palestina–Israel. Dimana salah satunya sejak 26 Juli 2002, Amerika Serikat mengumandangkan Doktrin Negroponte, kelanjutan dari Doktrin *Israel First* yang menyatakan bahwa Amerika akan selalu siap menentang setiap resolusi Dewan Keamanan PBB yang berusaha untuk menghukum Israel. Terbukti dengan banyaknya veto yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat terhadap resolusi PBB. Khusus konflik Palestina-Israel, dari 82 veto Amerika Serikat, nyaris setengahnya berhubungan dengan dukungan Amerika Serikat (AS) terhadap Israel, yaitu sebanyak 41 veto

Kalaupun Amerika Serikat tidak tegas memveto resolusi PBB, kasus pada Resolusi 1860 tentang penghentian kekerasan di Gaza, setelah disahkan oleh Dewan Keamanan PBB, AS abstain. Menurut data, dalam konflik Arab-Israel, dari 175 resolusi Dewan Keamanan PBB tentang Israel, 97 menentang Israel, 74 netral dan 4 mendukung Israel. Tentunya ini tidak termasuk resolusi yang diveto Amerika Serikat. (Masrie, 2008).

Hubungan AS-Israel

Kedekatan Amerika Serikat dengan Israel, menurut pemberitaan *The New York Times*, bisa dilihat dari rutinitas Amerika memberikan bantuan ke Israel sebesar USD 77 miliar sejak tahun 1967.

Sejak Perang Oktober 1973, Washington sudah memberi bantuan langsung ekonomi dan militer kepada Israel sebesar USD 140 miliar. Sedangkan sejak 1976 sampai sekarang, setiap tahun Amerika Serikat memberi Israel bantuan langsung USD 3 miliar, seperenam dari budget bantuan luar negerinya.

SIMPULAN

Prospek Perdamaian Palestina-Israel masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala baik internal maupun eksternal. Di pihak Israel konflik internal antar golongan dan kekuatan politik saling menonjolkan kekuatannya dalam menyikapi posisi Palestina dan para pejuang kemerdekaan Palestina. Begitu juga di pihak Palestina dihadapkan pada konflik internal antara Fatah dan Hamas dalam menyamakan persepsi memilih strategi yang pas untuk perjuangan kemerdekaan Palestina. Akhirnya ketika dua negara yang berkonflik masih disibukan dengan masalah internalnya memunculkan kekhawatiran akan masa depan perdamaian Palestina-Israel akan terwujud dalam waktu cepat. Namun kemungkinan perdamaian tetap ada bila didukung dengan itikad baik semua pihak yang terkait konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Armstrong, K., (2000). *The Battle for God: A History of Fundamentalism*. New York:Ballantine Books.
- Aspiannor, Masrie. (2008). Reformasi PBB Mati Suri. Fajar Online, 22 Oktober.

Garaudy, Roger. (1995). *Zionisme Sebuah Gerakan Keagamaan dan Politik*, Terj. oleh Moelia Radja Siregar, Gema Insani Press, Jakarta.

Juergensmeyer, Mark. (2000). *Terror in the mind of god: The global rise of religious violence*: Fourth edition. Berkeley, CA: University of California Press.

Katz, Jacob & Friends. (1997) *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Zionisme*, Terj. oleh Joko Susilo, M.A, Pustaka Progresif, Surabaya.

Perez, Don (1990). *Intifadhah: The Palestinian Uprising*.

Peter L., Berger, (ed.), *Kebangkitan Agama Menantang Politik Dunia*, Arruzz, Yogyakarta, 2003.

Sihbudi, M. Riza dkk. (1995). *Profil Negara-negara Timur Tengah*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995

Sihbudi, M.Riza dkk. (1993) *Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah*, PT Eresco. Bandung.

Sharif, Regina S.(ed). (1998) *United Nations on Palestine and The Arab-Israeli Conflict*, vol. II, Institute for Palestine Studies, Washington.

Ishlah, *Profil Partai Politik Israel*, Nomor 58/Th. IV, 1996

Kompas, 12 Mei 2002

Harian Pelita, 28 Juni 1996